

A. Visi Provinsi Kepulauan Riau

“Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”.

Visi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Visi Pemerintah Provinsi Kepri, Dinas Pendidikan bertindak sebagai motor penggerak utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan pengembangan kualitas dan kuantitas di sektor pendidikan secara proporsional dengan menetapkan standar-standar kompetensi didalam manajemen pengembangannya. Peran ini dapat dilakukan melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya secara komprehensif sehingga dapat memotivasi seluruh unsur masyarakat untuk turut serta dapat berpartisipasi dalam penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana umum. Selain itu Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau akan senantiasa berupaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia melalui berbagai program-program pendidikan dan pelatihan, baik yang bersifat formal ataupun non formal.

Kata kunci dari visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2016-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebagai Bunda Tanah Melayu

Mengandung arti bahwa Provinsi Kepulauan Riau diharapkan tetap menjadi wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan seni budaya melayu dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai adat dan budaya melayu tersebut dilestarikan agar tidak pudar terpengaruh oleh budaya luar.

2. Sejahtera

Sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dsb). Masyarakat sejahtera dapat diartikan secara luas yaitu masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya (pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pangan, perumahan, dan jaminan sosial).

3. Berakhlak Mulia

Berakhlak mulia mengandung arti bahwa diharapkan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau telah dapat mempertahankan nilai-nilai moralitas masyarakat melayu dimana Agama Islam menjadi sumber utama referensinya dengan dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan bagi

masyarakat selain Islam juga dapat melaksanakan ajaran agamanya, sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama.

4. Ramah Lingkungan

Ramah lingkungan mengandung arti bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan menjadi wilayah dengan lingkungan yang bersih, sehat, asri, dan nyaman sehingga perlu didukung dengan sistem pengelolaan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah yang baik, pemanfaatan ruang yang memenuhi aspek daya dukung lingkungan, dan dilengkapi ruang terbuka hijau yang memadai.

5. Unggul di Bidang Maritim

Unggul di bidang maritim diartikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau dicita-citakan memiliki keunggulan pada sektor kemaritiman terutama sektor kelautan dan perikanan, perhubungan, dan pariwisata didukung dengan pembangunan sektor-sektor lainnya dengan berorientasi pada kemaritiman (*maritim oriented*). Pembangunan kemaritiman diharapkan mampu mewujudkan tujuan pembangunan bidang maritim, yaitu: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan; menghasilkan produk dan jasa kelautan yang berdaya saing tinggi; meningkatkan kontribusi sektor kelautan bagi perekonomian daerah; menciptakan lapangan kerja; meningkatkan konsumsi ikan; dan memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian sumberdaya kelautan. Keunggulan di bidang maritim juga mencakup konektivitas antar pulau dan antar kabupaten/kota, serta pemanfaatan potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pengembangan pariwisata bahari.

Dalam rangka mewujudkan visi kepala daerah, misi yang ditempuh sebanyak 9 (sembilan) misi, yaitu sebagai berikut.

1. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.
2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.
4. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

5. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan
6. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
7. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.
8. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.
9. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa Dinas Pendidikan mendukung pelaksanaan misi ke-3 yaitu *“Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi”*. Tujuan bidang pendidikan yang ingin dicapai dari pelaksanaan misi ke-3 tersebut adalah meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia agar berpendidikan, berprestasi dan berdaya saing, dengan sasaran: Meningkatnya indeks pembangunan manusia, Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan.

B. Tujuan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur tahun 2016-2021 adalah:

1. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan yang berkesetaraan gender untuk sekolah Menengah dan Sekolah Luar Biasa di semua kabupaten/kota,
2. Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter pada sekolah menengah dan sekolah luar biasa,

3. Meningkatkan penerapan standar nasional pendidikan pada sekolah Menengah dan Sekolah Luar Biasa, serta mengembangkan sekolah kemaritiman,
4. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru serta kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah Menengah dan Sekolah Luar Biasa, dengan sasaran:
5. Meningkatkan kualitas tata kelola kinerja pendidikan,

C. Tujuan Strategis Dinas Pendidikan

Tujuan Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021 mengacu pada tujuan strategis pembangunan pendidikan Nasional yang dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima pendidikan sebagaimana dikehendaki dalam Visi misi jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau dan Visi misi Kemendiknas. Dengan demikian tujuan strategi Dinas Pendidikan 2016-2021 adalah sebagai berikut;

Tabel 2.1
Penjabaran Tujuan Strategis Dinas Pendidikan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET TAHUN 2017
(1)	(2)		(3)	(4)
1	Meningkatnya ketersediaan dan pemerataan akses pendidikan menengah dan khusus	1.1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	10,00 tahun
		1.2	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/MAK	87,00%
		1.3	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	69,00%
		1.4	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/MAK	76,00%
		1.5	Rasio Siswa Per Ruang Kelas	1:36
		1.6	Persentase Ruang Kelas SMA/MA/SMK/MAK Dalam Kondisi Baik	87,50%
		1.7	Persentase Ruang Kelas SLB Dalam Kondisi Baik	86,00%
		1.8	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru SMA/MA/SMK/MAK	50 unit
2	Meningkatnya Angka Melanjutkan Siswa ke Jenjang Pendidikan Menengah dan Khusus	2.1	Persentase Angka Melanjutkan Siswa SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	89,40%
3	Menurunnya Angka Putus Sekolah Pendidikan Menengah dan Khusus	3.1	Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK	0,44%

4	Meningkatnya sekolah yang berakreditasi dan berdaya saing pada pendidikan menengah dan khusus	4.1	Persentase Sekolah SMA/SMK/SLB yang berakreditasi Minimal B	78,00%
		4.2	Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B	57,00%
		4.3	Persentase SMK yang sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha/Dunia Industri dan berproduksi	6,32%
		4.4	Persentase SMK dengan jurusan kemaritiman	16,00%
		4.5	Persentase Peserta Didik yang memiliki kompetensi non akademik (minat, bakat, prestasi)	35,00%
5	Meningkatkan Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Pendidik	5.1	Persentase Guru SMA/SMK/SLB yang berkualifikasi S1/D4	88,00%
		5.2	Persentase Guru yang sudah sertifikasi	33,00%
		5.3	Persentase Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dipersyaratkan	60,00%
		5.4	Persentase Guru yang sudah mengikuti Pelatihan berbasis IT	44%
6	Meningkatnya Kompetensi Lulusan Sekolah Menengah dan Khusus	6.1	Persentase lulusan SMA/MA yang diterima di PT	40,00%
		6.2	Persentase lulusan SMK yang diterima di Du/Di dan berwirausaha	40,00%
7	Meningkatnya kualitas Layanan Pendidikan berbasis Teknologi Informasi	7.1	Rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) SMA/MA/SMK/MAK	54,2
		7.2	Persentase SMA/MA/SMK yang memiliki sistem Informasi Manajemen berbasis IT	60,00%
		7.3	Persentase Kabupaten/Kota yang sudah terlayani akses siaran TV Pendidikan	42,85%
		7.4	Persentase sekolah Penyelenggara UNBK	45,00%

D. Strategi dan Kebijakan

Strategi yang ditempuh oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses pendidikan menengah melalui penerapan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas
2. Memfasilitasi dukungan pembiayaan bagi anak dari keluarga kurang mampu.
3. Mendorong orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

4. Mendorong peran swasta dalam penyediaan layanan pendidikan menengah yang berkualitas.
5. Melakukan pengembangan kurikulum agar siswa dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi, minat, kecerdasan individu, dan keunggulan serta karakteristik local.
6. Meningkatkan penyediaan fasilitas penunjang mutu pendidikan seperti alat peraga, laboratorium, dan perpustakaan sesuai standar.
7. Meningkatkan penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan
8. Meningkatkan sarana dan prasarana penyiaran TV kepri agar jangkauannya luas
9. Meningkatkan fasilitasi sekolah dalam persiapan pelaksanaan akreditasi sekolah.
10. Meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja untuk meningkatkan kesiapan siswa memasuki dunia kerja.
11. Menambah jumlah jenis pendidikan sekolah kejuruan terutama yang berhubungan dengan kemaritiman
12. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, serta akuntabilitas guru dan tenaga kependidikan melalui tugas belajar dan diklat/pelatihan.
13. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, sarana dan prasarana, dokumen perencanaan dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pendidikan

Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah dengan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), dan pembangunan SMP-SMA satu atap dengan prioritas pada daerah Hinterland
2. Pemberian beasiswa bagi penduduk usia 16-18 tahun kategori anak dari keluarga kurang mampu dan berprestasi.
3. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan
4. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru dalam pengembangan dan penerapan kurikulum pendidikan.
5. Penyediaan fasilitas pendidikan penunjang peningkatan mutu pendidikan dengan prioritas pada daerah hinterland.
6. Peningkatan penggunaan aplikasi teknologi informasi pendidikan

7. Pembangunan sarana dan prasarana penyiaran TV kepri dengan prioritas pada daerah yang belum terjangkau siarannya.
8. Pemenuhan standar nasional pendidikan menengah secara bertahap
9. Peningkatan fasilitasi, pemantuan dan evaluasi pelaksanaan akreditasi pendidikan menengah.
10. Pengembangan SMK kemaritiman dan penambahan jurusan kemaritiman pada SMK sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten/kota.
11. Peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru dan tenaga kependidikan.
12. Peningkatan uji kompetensi guru dan tenaga kependidikan sebagai bagian dari proses penilaian hasil belajar siswa;
13. Pelaksanaan penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan secara berkesinambungan.
14. Penerapan standar pelayanan dalam proses pelayanan publik, serta peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pendidikan.

Secara rinci keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Ketersediaan dan Pemerataan Akses Pendidikan	Meningkatnya Ketersediaan dan Pemerataan Akses Pendidikan Menengah dan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akses pendidikan menengah melalui penerapan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas • Mendorong peran swasta dalam penyediaan layanan pendidikan menengah yang berkualitas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah dengan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), dan pembangunan SMP-SMA satu atap dengan prioritas pada daerah Hinterland



	<p>Meningkatnya Angka Melanjutkan Siswa ke Jenjang Pendidikan Menengah dan Khusus</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan
	<p>Menurunnya Angka Putus Sekolah Pendidikan Menengah dan Khusus</p>	<ul style="list-style-type: none"> Memfasilitasi dukungan pembiayaan bagi anak dari keluarga kurang mampu 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberian beasiswa bagi penduduk usia 16-18 tahun kategori anak dari keluarga kurang mampu dan berprestasi
<p>Meningkatkan Daya Saing Kelembagaan sesuai dengan standar Pelayanan Pendidikan Menengah dan Khusus serta Pengembangan Sekolah Kemaritiman</p>	<p>Meningkatnya Sekolah yang Berakreditasi dan Berdaya Saing pada Pendidikan Menengah dan Khusus</p>	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan penyediaan fasilitas penunjang Akreditasi Sekolah seperti tenaga pendidik, ruang belajar yang nyaman, alat peraga, laboratorium, dan perpustakaan sesuai standar Meningkatkan daya saing pendidikan keahlian sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha (Du) dan Dunia Industri (Di) untuk meningkatkan kesiapan siswa memasuki dunia kerja/berwirausaha Menambah jumlah satuan pendidikan kejuruan terutama yang berhubungan dengan kemaritiman Melakukan pengembangan kurikulum agar siswa dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi, minat, kecerdasan individu, dan keunggulan serta karakteristik lokal 	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan standar nasional pendidikan menengah secara bertahap Peningkatan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan akreditasi pendidikan menengah Peningkatan Kompetensi Keahlian SMK yang sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha (Du) dan Dunia Industri (Di) Penyediaan ruang dan alat praktek yang sesuai dengan standar Pengembangan SMK kemaritiman dengan penambahan jurusan kemaritiman pada SMK sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten/kota Peningkatan persiapan peserta didik untuk mengikuti lomba baik nasional maupun internasional
<p>Meningkatkan</p>	<p>Meningkatnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Kualifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberian ijin belajar



<p>Kualitas dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus</p>	<p>Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Pendidik</p>	<p>Tenaga Pendidik dengan memberikan ijin belajar bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan sertifikasi Tenaga Pendidik • Meningkatkan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan 	<p>dalam rangka peningkatan kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sertifikasi guru • Peningkatan uji kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan • Pelaksanaan penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan secara berkesinambungan
	<p>Meningkatnya Kompetensi Lulusan Sekolah Menengah dan Khusus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas kebutuhan pembelajaran terutama alat praktek bagi peserta didik yang sesuai dengan standar pelayanan minimum • Meningkatkan pelatihan dan kompetensi siswa menuju dunia usaha dan dunia industri 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan fasilitas pendidikan penunjang peningkatan mutu pendidikan dengan prioritas pada daerah hinterland • Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dalam peningkatan kompetensi siswa
	<p>Meningkatnya kualitas Layanan Pendidikan berbasis IT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Informasi Manajemen sekolah berbasis IT • Meningkatkan jangkauan akses siaran TV pendidikan • Meningkatkan sekolah penyelenggaraan UNBK 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerataan jaringan internet untuk sekolah menengah dan khusus sampai ke daerah hinterland • Memperluas jangkauan akses siaran TV pendidikan • Memfasilitasi sekolah penyelenggaraan UNBK

E. Kebijakan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021

1. Kebijakan Umum Provinsi Kepulauan Riau:

- 1) Menghadirkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi (diatas 7 % Per tahun), Berkualitas (menyerap banyak tenaga kerja dan mensejahterakan seluruh penduduk Kepulauan Riau secara berkeadilan), dan berkelanjutan.
- 2) Revitalisasi dan pengembangan infrastruktur baru yang berkualitas serta dapat mendukung pembangunan ekonomi secara produktif, berdaya saing dan berkelanjutan.
- 3) Pemenuhan (Swasembada) energi listrik dan pasokan gas untuk menunjang kebutuhan sektor ekonomi, industri dan kehidupan rumah tangga secara ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas SDM (Masyarakat) melalui program pendidikan, kesehatan dan pelatihan yang berkualitas secara terpadu dan berkesinambungan.
- 5) Meningkatkan Kesejahteraan Buruh, Petani, Nelayan, dan Rakyat Kecil (Wong Cilik).
- 6) Menciptakan iklim investasi dan usaha (bisnis) yang kondusif dan atraktif.
- 7) Memelihara dan meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan untuk menjamin pembangunan sosio-ekonomi berlangsung secara berkelanjutan.
- 8) Membangun pemerintah yang bersih dan berwibawa (Good Governance).
- 9) Mengembangkan Pri - Kehidupan yang Agamais dan Berbudaya serta Demokratis dalam bingkai Pancasila.

2. Kebijakan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau:

- 1) Meningkatkan kualitas pendidikan dan pembinaan sumberdaya manusia.
- 2) Menerapkan Pendidikan Budi Pekerti dan Budaya Daerah.
- 3) Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan.
- 4) Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas dan terampil dalam bidang IPTEK.

3. Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Kurun Waktu 2016-2021:

- 1) Peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah dengan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), dan

- pembangunan SMP-SMA satu atap dengan prioritas pada daerah Hinterland;
- 2) Pemberian beasiswa bagi penduduk usia 16-18 tahun kategori anak dari keluarga kurang mampu dan berprestasi;
 - 3) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan
 - 4) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru dalam pengembangan dan penerapan kurikulum pendidikan;
 - 5) Penyediaan fasilitas pendidikan penunjang peningkatan mutu pendidikan dengan prioritas pada daerah hinterland;
 - 6) Peningkatan penggunaan aplikasi teknologi informasi pendidikan berbasis IT;
 - 7) Pembangunan sarana dan prasarana penyiaran TV kepri dengan prioritas pada daerah yang belum terjangkau siarannya;
 - 8) Pemenuhan standar nasional pendidikan menengah secara bertahap;
 - 9) Peningkatan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan akreditasi pendidikan menengah dan khusus;
 - 10) Pengembangan SMK kemaritiman dan penambahan jurusan kemaritiman pada SMK sesuai dengan kebutuhan masing-masing Kabupaten/Kota;
 - 11) Peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi tenaga pendidik;
 - 12) Peningkatan uji kompetensi tenaga pendidik sebagai bagian dari proses penilaian hasil belajar siswa;
 - 13) Pelaksanaan penilaian kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara berkesinambungan;
 - 14) Penerapan standar pelayanan dalam proses pelayanan publik, serta peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pendidikan.

4. Kebijakan Khusus Di Bidang pendidikan:

1. Penambahan dan perbaikan akses pendidikan;
2. Pembinaan dan pengembangan semua jenis, jenjang dan jalur Pendidikan
3. Penambahan dan Pemantapan pendidikan kejuruan;
4. Pemberian beasiswa bagi siswa/mahasiswa berprestasi atau yang tidak mampu, ke berbagai Universitas terbaik, S1, S2, S3
5. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, serta kualifikasi Guru

6. Pemenuhan kebutuhan guru di bidang ilmu tertentu yang masih dibutuhkan;
7. Peningkatan kompetensi guru melalui program diklat dan pendidikan profesi berkelanjutan
8. Pemberian dukungan bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan swasta;
9. Pembangunan taman bacaan masyarakat;
10. Pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah bertaraf Internasional, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.

5. Program Tahun 2018

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Manajemen Pelayanan Pendidikan
6. Peningkatan Mutu Pendidikan
7. Pendidikan Menengah dan Khusus
8. Penyusunan dan Publikasi Data/Informasi